



**Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tana Toraja**

Olivia Devi Yulian P^{a,*}, Stefani Marina Palimbong^b

^{a,b} Universitas Kristen Indonesia Toraja

*Corresponding author email address: oliviadyp@gmail.com

**ARTICLE
INFO**

ABSTRACT

Keywords:
Budget,
Performance,
Spending.

Budget Performance Analysis at the General Election Commission (KPU) of Tana Toraja Regency. In terms of carrying out the duties and responsibilities that must be carried out in order to achieve performance that has effective and efficient final results, of course, must pay attention to the quality of work. One of the work task that must be considered is financial management. In this study, the analytical techniques used are analysis of spending variance, analysis of spending growth, analysis of shopping compatibility and spending efficiency ratios. In accordance with the results of the analysis of expenditure variance, it can be seen that the realization of the annual budget describes the budget absorption of the General Election Commission of Tana Toraja Regency which has been carried out in accordance with applicable regulations. Expenditure growth analysis shows a spending growth from 2017-2018 of Rp. 14.463.506.981 or 461.14%, in 2018-2019 of Rp. 3.434.993.534 or expenditure compatibility analysis shows that spending activity in the 2017-2019 budget year at the KPU is mostly allocated for capital expenditures and only a few percent is allocated for operating expenditures. And the results of the calculations of the spending efficiency ratio in 2017 were 82.84%, in 2018 it was 88.67%, and in 2019 it was 94.40%.

Kata Kunci:
Anggaran,
Kinerja,
Belanja

Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan demi mencapai kinerja yang memiliki hasil akhir yang efektif dan efisien, tentunya harus memperhatikan kualitas kerja. Salah satu tugas kerja yang harus diperhatikan yaitu tentang pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Sesuai dengan hasil

analisis varians belanja dapat dilihat realisasi anggaran pertahun menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan belanja dari tahun 2017-2018 sebanyak Rp14.463.506.981,- atau sebesar 461,14%, tahun 2018-2019 sebanyak Rp3.434.993.534,- atau sebesar 19,52%. Analisis keserasian belanja menunjukkan aktivitas belanja di tahun anggaran 2017-2019 aktivitas belanja di KPU sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja modal dan hanya beberapa persen yang dialokasikan untuk belanja operasi. Dan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja pada tahun 2017 sebesar 82,84%, tahun 2018 sebesar 88,67% dan tahun 2019 sebesar 94,40%.

Pendahuluan

Kemajuan restorasi bidang publik yang begitu antusias saat ini tidak dapat dikeluarkan dari tuntunan masyarakat yang melihat secara keras buruknya prestasi pemerintah dalam mengerjakan sumber daya publik. Transfigurasi berbagai segi yang didukung oleh perputaran restorasi sudah menumbuhkan tuntunan yang bermacam-macam terhadap tata kelola pemerintahan. Peningkatan sifat administrasi moneter pemerintah ditegakkan oleh dewan, khususnya oleh proporsionalitas ukuran pengaturan uang publik dalam tahap pelaksanaan pengeluaran dengan rencana penarikan aset untuk masing-masing pemangku kepentingan.

Pelaksanaan belanja merupakan salahsatu tahapan siklus belanja yang dimulai dengan penyusunan belanja, persetujuan dan penjaminan rencana keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), pengelolaan belanja, pelaksanaan belanja, dan tanggung jawab pelaksanaan belanja. Pemerintah diketahui sebagai pelaksana UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudian menguasai Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang diidentikkan dengan aturan pelaksanaan pendapatan negara dan menggunakan rencana pengeluaran sebagai alasan yang sah untuk pelaksanaan rencana keuangan negara.

Instansi pemerintah yang merupakan pemegang kuasa pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berpatokan pada tujuan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dari suatu instansi. Maka dari itu dalam pemerintah mengelolah Dana Anggaran semuanya itu tidak luput dari Kinerja Anggaran yang merupakan penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan atau perealisasi dari anggaran yang dituangkan melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan dari kementerian Negara/Lembaga antara lain, laporan pengakuan pengeluaran yang merupakan salah satu laporan keuangan yang dipublikasikan untuk memberikan data berharga untuk evaluasi pelaksanaan kinerja keuangan. Laporan pengakuan pengeluaran semacam ini adalah laporan keuangan yang pertama kali disampaikan sebelum membuat laporan laporan pendapatan dan neraca. Dalam laporan realisasi anggaran memuat tentang semua aktivitas perealisasi anggaran. Dan dapat dilihat bahwa anggaran yang merupakan dasar dari pelaksanaan segala penyelenggaraan pemerintahan dan mempunyai peranan penting sebagai metode penyesuaian, penyebarluasan, alokasi aset-aset publik, penataan hierarkis dan pengendalian serta pemeriksaan pelaksanaan. Dengan cara ini, laporan realisasi anggaran berubah menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Mengingat laporan realisasi anggaran tersebut, pengguna laporan dapat melakukan pemeriksaan presentasi ringkasan anggaran seperti pemeriksaan pembayaran, pemeriksaan biaya dan pemeriksaan pembiayaan.

Analisis pada belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena belanja merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan belanja dalam laporan pengakuan pengeluaran merupakan segmen signifikan yang menyambut baik pertimbangan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya sebagai pemasok aset terbuka melalui pungutan terdekat mereka menaruh minat untuk menyadari apakah sumber daya terbuka telah digunakan dengan tepat, memadai dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Karena mempertimbangkan gagasan pengeluaran yang cukup sederhana untuk dilakukan dan tidak tahan terhadap kegagalan, maka harus bersiap-siap dalam mengontrol dan mengelola pengeluaran. Setelah dibelanjakan dan diungkapkan dalam laporan pengakuan pengeluaran, penyelidikan penggunaan ini juga harus diselesaikan untuk digunakan sebagai alasan untuk penilaian, perbaikan dan peningkatan di kemudian hari.

Obyek penelitian dalam proposal ini adalah komisi pemilihan umum kabupaten tana toraja. Obyek ini dipilih karena komisi pemilihan umum kabupaten tana toraja adalah kementerian/lembaga yang mewakili kementerian komisi pemilihan umum RI dalam mengemban tugas melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Legislatif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja juga di beri tanggung jawab untuk mengelolah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Keuangan Penggunaan Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang akan digunakan untuk melakukan semua latihan sesuai dengan rencana kerja otoritas publik atau Rencana Kerja Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Tana Toraja. Melihat landasan

tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Kajian Pustaka

Pengertian Anggaran

Menurut Halim (2016:48), “anggaran belanja merupakan catatan yang memuat proporsi pelaksanaan, baik pembayaran maupun penggunaan, yang diketahui dengan istilah uang tunai yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan memasukkan informasi sebelumnya sebagai jenis evaluasi kontrol dan eksekusi”. Sedangkan menurut Sasongko (2015:2) “mengatakan anggaran adalah rencana kerja yang sengaja disusun dan disampaikan dalam satuan kas pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya”.

Rencana keuangan dalam organisasi pemerintah adalah dasar dari pelaksanaan semua latihan administrasi. Rencana keuangan memiliki peran penting sebagai metode penyesuaian, peruntukan aset publik, pengaturan dan pengendalian otoritatif dan pemeriksaan pelaksanaan. Akibatnya, laporan pengakuan pengeluaran menjadi salah satu laporan tanggung jawab moneter provinsi yang utama. Sehubungan dengan laporan pengakuan pengeluaran, klien laporan dapat melakukan pemeriksaan presentasi laporan keuangan sebagai pemeriksaan pembayaran, pemeriksaan konsumsi dan pemeriksaan keuangan.

Pengertian Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006, “belanja yang ditunjukkan dengan tanda-tanda penggunaan, khususnya penggunaan belanja tidak langsung merupakan penggunaan terencana yang tidak secara langsung diidentikkan dengan pelaksanaan rencana kerja dan latihan”. Sedangkan dalam Undang-undang Republik nomor 10 tahun 2010 pasal 1 nomor 8-9 bahwa “Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembang, sesuai dengan program.

Dalam laporan realisasi anggaran, kalsifikasi belanja yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Tata Tertib Perencanaan Laporan Keuangan Jasa/badan Usaha Negara yaitu :

1. Belanja Negara
2. Belanja Modal
3. Belanja Barang
4. Belanja Pegawai
5. Pembayaran Bunga Utang
6. Hibah
7. Subsidi

8. Bantuan Sosial
9. Belanja Lain-lain

Pengertian Kinerja

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun (2012:25), “kinerja (performa) adalah derajat ketercapaian pelaksanaan suatu program untuk memahami tujuan, sasaran, misi, dan visi asosiasi yang terutang dalam kesiapan pada dasarnya suatu asosiasi”. Sedangkan menurut Mangkunegara (2016: 67) “istilah kinerja berasal dari kata eksekusi kerja atau eksekusi nyata. Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah mutu dan ukuran pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang buruh dalam melaksanakan komitmennya sesuai dengan usaha yang diberikan kepadanya”.

Berdasarkan penilaian para ahli diatas, kita dapat menggolongkan pelaksanaan sebagai efek lanjutan dari pekerjaan yang diselesaikan oleh individu yang disesuaikan dengan pekerjaan atau pekerjaan individu itu dalam suatu asosiasi yang diidentifikasi dengan kualitas atau norma tertentu dari asosiasi tempat individu tersebut bekerja.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan penilaian antara rencana keuangan dan pengakuannya dalam jangka waktu yang jelas. Alasan dibalik merinci rencana keuangan yaitu untuk memberikan data mengenai rencana pengeluaran dan rencana keuangan yang diatur. Menurut Dwi (2015:25), “Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah salah satu segmen dari laporan keuangan otoritas publik yang menyajikan data tentang pengakuan dengan rencana keuangan dari elemen perincian untuk periode tertentu. Laporan realisasi anggaran terdiri dari rencana pengeluaran pendapatan, penggunaan, pemindahan dan pembiayaan”. Laporan realisasi anggaran memberikan data tentang pengakuan pembayaran, biaya, perpindahan, kelebihan/kekurangan realisasi anggaran juga pembiayaan dari suatu elemen yang masing-masing dikontraskan dari rencana pengeluarannya.

1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

SAP 2010 (2010:31) “menyatakan bahwa sasaran standar laporan pengakuan belanja adalah untuk menetapkan standar penyajian laporan pengakuan pengeluaran bagi otoritas publik untuk memenuhi tujuan tanggung dan jawab yang ditetapkan dalam undang-undang”. Selain itu, tujuan di balik penggunaan laporan pengakuan pengeluaran adalah untuk memberikan data tentang pengakuan dan rencana keuangan dari substansi perincian, hubungan antara realisasi dan pencapaiannya, menunjukkan tingkat pencapaian fokus yang telah diselesaikan antara dewan dan kepala sesuai dengan undang-undang dan pedoman.

2. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Menurut SAP 2010 (2010:92) laporan realisasi anggaran memberikan data tentang pengakuan pendapatan, penggunaan, pemindahan, laporan pengakuan pengeluaran yang berlebihan/tidak ada, dan pembiayaan dari elemen komponen pengumuman, yang masing-masing dikontraskan dari rencana pengeluarannya. Data ini berguna bagi klien pengguna laporan dalam menilai keputusan sehubungan dengan peruntukan aset keuangan, tanggung jawab juga konsistensi unsur pengumuman dengan rencana keuangan dengan :

1. Memberikan data terkait dengan sumber, pemanfaatan aset pembiayaan dan alokasi
2. Memberikan data yang terkait dengan pengakuan belanja umum yang digunakan dalam menilai pelaksanaan pemerintah sejauh kecukupan dan kemampuan penggunaan belanja

Kinerja Anggaran Belanja

Istilah kinerja secara teratur digunakan untuk menyinggung pencapaian atau tingkat pencapaian orang-orang atau kumpulan orang-orang yang memiliki standar pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya. Aturan pencapaian ini sebagai tujuan atau fokus yang pasti untuk dapat dicapai. Tanpa alasan atau teknik, penyajian individu atau perkumpulan tidak dapat diketahui karena tidak ada patokan.

Menurut Mahmudi (2016:154), “mengkaji presentasi keuangan suporter provinsi diarahkan untuk mensurvei dan menilai daerah-daerah yang telah dimanfaatkan APBD secara baik, layak dan finansial. Mensurvei kinerja keuangan pengeluaran harus dimungkinkan dengan baik jika pengakuan pengeluaran lebih rendah dari rencana pengeluaran. Dengan berpedoman pada data laporan pengakuan belanja, kita dapat melakukan pemeriksaan terhadap rencana keuangan antara lain :

1. Analisis Varians Belanja

Analisis tersebut merupakan penyelidikan perbedaan atau kontras antara pengakuan penggunaan dan rencana keuangan. Apabila ada perbedaan kelimpahan (penggunaan asli melebihi jumlah yang direncanakan, itu dapat dikatakan memiliki presentasi penggunaan moneter yang buruk, sementara jika ada kontras yang lebih kecil (penggunaan sebenarnya tidak persis seperti yang direncanakan). Maka kinerja keuangan daerah dapat dinilai baik.

Sebagaimana dikemukakan Mahmudi (2016:155) perbedaan dalam rencana pengeluaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, lebih spesifiknya :

- A. Yang penting disukai, yaitu jika rencana keuangan lebih diperhatikan dari pada konsumsi yang tulus.

B. Hal yang penting tidak disukai, misalnya jika anggaran belanja lebih kecil dari konsumsi aslinya.

Menurut Mahmudi (2016:155), rumus untuk mengukur kinerja sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

varians belanja dapat diestimasi dengan kriteria pengukuran kinerja keuangan seperti yang terdapat dalam table 1

Tabel 1
Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Menurut Mahmudi (2016:158) “pertumbuhan belanja adalah perluasan atau pengurangan pengeluaran selama jangka waktu tertentu”. Investigasi pembangunan serta survei penggunaan barang juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan sumber daya, kewajiban, nilai, upah, dan lain-lain. Penilaian kemajuan lokal berguna untuk mengetahui peningkatan pemanfaatan mulai dari satu tahun kemudian ke tahun berikutnya. Pengeluaran teritorial itu sendiri biasanya akan meningkat secara umum, ekspansi ini terjadi karena penyesuaian terhadap pembengkakan, perubahan skala swapping rupiah, perubahan inklusi bantuan dan perubahan sesuai dengan variabel makroekonomi. rumus pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Rea.Belanja Thn } t - \text{Rea.Belanja Thn } t-1}{\text{Rea.Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak pertumbuhan setiap penggunaan, terlepas dari itu apakah pertumbuhan tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mahmudi (2016:158), penilaian pertumbuhan belanja dan korelasinya dapat diestimasi dengan model-model untuk memperkirakan pelaksanaan kinerja keuangan, dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2
Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria Penilaian Pertumbuhan	Ukuran Pertumbuhan Belanja
Naik	Positif
Turun	Negatif

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja sangat membantu untuk mengetahui keselarasan antara pengeluaran. Hal ini diidentifikasi dengan kapasitas rencana keuangan sebagai metode untuk penugasan, penunjukan serta penyesuaian. Semua bersama-sama agar kapasitas belanja berjalan dengan tepat, pemerintah daerah harus menyesuaikan pengeluaran. Proporsi kesamaan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah fokus pada porsi normal mereka untuk penggunaan rutin dan perbaikan secara ideal. Ada dua perkiraan dalam proporsi kesamaan ini, khususnya: proporsi konsumsi operasional dan proporsi penggunaan modal analisis keserasian belanja berupa :

A. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja adalah korelasi antara penggunaan habis-habisan yang didistribusikan untuk penggunaan belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi adalah penggunaan yang manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran, sehingga konsumsi kerja bersifat sesaat dan dalam hal-hal tertentu bersifat tipikal atau tumpul. Menurut Mahmudi (2016:162), rumus pengukuran kinerjanya adalah :

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

B. Analisis Belanja Modal pada Total Belanja

Analisis belanja modal atas penggunaan penuh adalah pemeriksaan antara penggunaan modal yang diakui secara mutlak dan penggunaan seluruh daerah. Mengingat proporsi ini, pembaca laporan dapat menemukan bagian dari konsumsi teritorial yang didistribusikan untuk bunga sebagai penggunaan modal pada tahun anggaran berlangsung. Berbeda dengan penggunaan pekerjaan saat ini dan rutin, penggunaan modal saat ini akan memberikan keuntungan jangka menengah dan panjang. Menurut Mahmudi (2016:163), rumus pengukuran kinerjanya adalah :

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Menurut Mahmudi (2016:163), kriteria penilaian belanja operasi untuk penggunaan umum dan penggunaan modal pada konsumsi absolut dapat ditemukan pada tabel 3

Tabel 3

**Kriteria Penilaian Belanja Operasi terhadap Total Belanja
dan belanja Modal Terhadap Total belanja**

Kriteria Penilaian	Proporsi	Apabila dengan asumsi itu sesuai dengan tingkat yang telah ditentukan, itu sangat baik dapat diatur dalam klasifikasi yang masuk akal tetapi jika itu lebih atau bahkan tidak persis dengan tingkat yang ditentukan sebelumnya, itu sangat baik mungkin dianggap tidak setara
Belanja Operasi terhadap Total Belanja	60-90%	
Belanja Modal terhadap Total Belanja	5-20%	

4. Analisis Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:164), “rasio efisiensi belanja adalah konsumsi pemeriksaan antara penggunaan asli dengan rencana pengeluaran”. Proporsi efisiensi pembelanjaan ini digunakan untuk mengukur besarnya dana cadangan pembelanjaan yang dinyatakan pemerintah antara realisasi dan pembelanjaan total. Pemerintah terdekat dianggap telah melakukan kemampuan pembelanjaan jika tingkat produktivitasnya di bawah 100%. Lagi pula, dalam hal di atas 100%, itu menunjukkan telah terjadi penyalahgunaan pengeluaran. Penilaian Efisiensi Belanja dapat ditemukan dengan kriteria pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja

Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja	Keterangan
Kurang dari 100%	Efisien
Lebih dari 100%	Tidak efisien

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian secara kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan angka dan pengolahan statistic berupa Laporan Keuangan. Adapun satuan analisis dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja. Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran belanja KPU Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-201.

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan instrumen pemeriksaan pelaksanaan kinerja belanja (Mahmudi 2016:155).

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Tabel 5
Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Rea. Belanja Thn}_t - \text{Re. Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Tabel 6
Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria Penilaian Pertumbuhan	Ukuran Pertumbuhan Belanja
Naik	Positif
Turun	Negatif

3. Analisis Keserasian Belanja

Ada dua perkiraan dalam proporsi keserasian ini, yaitu rasio proporsi penggunaan operasional dan rasio penggunaan modal

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 7
Kriteria Penilaian Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan belanja Modal Terhadap Total belanja

Kriteria Penilaian	Proporsi	
Belanja Operasi terhadap Total Belanja	60-90%	apabila dengan asumsi itu sesuai dengan tingkat yang telah ditentukan, itu sangat baik dapat diatur dalam klasifikasi yang masuk akal tetapi jika itu lebih atau bahkan tidak persis dengan tingkat yang ditentukan
Belanja Modal terhadap Total Belanja	5-20%	

		sebelumnya, itu sangat baik mungkin dianggap tidak setara
--	--	---

4. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 8
Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja

Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja	Keterangan
Kurang dari 100%	Efisien
Lebih dari 100%	Tidak efisien

Hasil

Dalam penelitian ini digunakan beberapa analisis data seperti analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja (analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal pada total belanja), dan analisis efisiensi belanja.

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja mengukur kinerja seberapa besar realisasi belanja dan anggaran belanja.

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$\text{Analisis Varians Belanja tahun 2017} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$= 3.136.479.165 - 3.786.135.000$$

$$= -649.655.835$$

$$\text{Analisis Varians Belanja tahun 2018} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$= 17.599.986.146 - 19.804.033.000$$

$$= -2.204.046.854$$

$$\text{Analisis Varians Belanja tahun 2019} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$= 21.034.979.680 - 22.281.801.000$$

$$= -1.246.821.320$$

Tabel 8
Analisis Varians Belanja KPU Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
2017	3.786.135.000	3.136.479.165	649.655.835	17,16%
2018	19.804.033.000	17.599.986.146	2.204.046.854	11,13%
2019	22.281.801.000	21.034.979.680	1.246.821.320	5,59%

Sumber : KPU Kabupaten Tana Toraja (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, anggaran dan realisasi belanja selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan nilai anggaran belanja lebih besar dari pada realisasi belanja.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100$$

1) Pertumbuhan Belanja Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Belanja Tahun 2018} &= \frac{17.599.986.146 - 3.136.479.165}{3.136.479.165} \times 100 \\ &= \frac{14.463.506.981}{3.136.479.165} \times 100 \\ &= 461,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Belanja Tahun 2019} &= \frac{21.034.979.680 - 17.599.986.146}{17.599.986.146} \times 100 \\ &= \frac{3.434.993.534}{17.599.986.146} \times 100 \\ &= 19,52\% \end{aligned}$$

Tabel 9
Pertumbuhan Belanja KPU Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Realisasi Belanja Tahun		Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan	%
		2018 (Rp)	2017(Rp)		
1.	BELANJA	17.599.986.146	3.136.479.165	14.463.506.981	461.14%
2	BELANJA GAJI PEGAWAI	1.192.919.695	1.998.435.375	85.515.680	4.28%
3	BELANJA BARANG	148.211.700	62.850.000	85.361.700	135.82%
4	BELANJA MODAL	16.258.854.751	1.075.193.790	15.183.660.961	1.412,18%

Sumber : KPU Kabupaten Tana Toraja (Data Diolah)

Tabel 10
Pertumbuhan Belanja KPU Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Realisasi Belanja Tahun		Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan	%
		2019 (Rp)	2018(Rp)		
1.	BELANJA	21.034.979.680	17.599.986.146	3.434.993.534	19,52%
2.	BELANJA GAJI PEGAWAI	2.145.551.241	1.192.919.695	232.631.546	12,16%
3.	BELANJA BARANG	142.167.100	148.211.700	6.044.600	4,1%
4.	BELANJA MODAL	18.747.261.339	16.258.854.751	2.488.406.588	13,27%

Sumber : KPU Kabupaten Tana Toraja (Data Diolah)

Dengan melihat tabel diatas, realisasi belanja tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2019 dengan nilai tahun 2018 sebesar 461,14% dan tahun 2019 sebesar 19,52%.

3. Analisis Keserasian Belanja

$$1) \text{ Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2017} &= \frac{2.061.285.375}{3.136.479.165} \times 100\% \\ &= 65,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2018} &= \frac{2.061.131.395}{17.599.986.146} \times 100\% \\ &= 11,71\% \end{aligned}$$

$$\text{Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2019} = \frac{2.287.718.341}{21.034.979.680} \times 100\%$$

= 110,88%

Tabel 11
Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Terhadap Total Belanja (%)
2017	2.061.285.375	3.136.479.165	65,72%
2018	2.061.131.395	17.599.986.146	11,71%
2019	2.287.718.341	21.034.979.680	10,88%

Sumber : KPU Kabupaten Tana Toraja (Data Diolah)

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, total belanja operasi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan sementara total belanja juga mengalami peningkatan, akan tetapi total belanja lebih besar dari pada total belanja operasi dengan tingkat rasio belanja terhadap total belanja untuk tahun 2017 sebesar 65,72% dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,88%.

$$2) \text{ Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2017} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.075.193.790}{3.136.479.165} \times 100\%$$

$$= 34,28\%$$

$$\text{Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2018} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{15.538.854.751}{17.599.986.146} \times 100\%$$

$$= 88,29\%$$

$$\text{Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2019} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{18.747.261.339}{21.034.979.680} \times 100\%$$

$$= 89,12\%$$

Tabel 12
Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal Terhadap
----------------	--------------------------	--------------------	------------------------------

			Total Belanja (%)
2017	1.075.193.790	3.136.479.165	34,28%
2018	15.538.854.751	17.599.986.146	88,29%
2019	18.747.261.339	21.034.979.680	89,12%

Sumber : KPU Kabupaten Tana Toraja(Data Diolah)

Tabel analisis belanja modal terhadap total belanja diatas menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dimana tahun 2017 rasionya sebesar 34,28% dan meningkat dengan signifikan untuk tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar 89,12%.

3) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja digunakan untuk melihat atau mengetahui keseimbangan dari suatu pengeluaran. Adapun analisis keserasian belanja dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13
Rasio Keserasian Belanja
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Total
2017	65,72	34,28	100
2018	11,71	88,29	100
2019	10,88	89,12	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi mengalami penurunan setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir tetapi hal ini berbanding terbalik dengan rasio belanja modal yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 14
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Kategori
Analisis Varians Belanja	17,16%	11,13%	5,59%	Baik
Analisis Pertumbuhan Belanja	-	461,14%	19,52%	Negatif (Turun)
Analisis Keserasian Belanja :				
Belanja Operasi terhadap Total Belanja	65,72%	11,71%	10,88%	Tidak Setara
Belanja Modal terhadap Total Belanja	34,28%	88,29%	89,12%	Tidak Setara
Efisiensi Belanja	82,84%	88,67%	94,40%	Efisien

Dari tabel diatas, analisis varians belanja mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 sisa anggaran berada pada angka 17,16%, kemudian pada tahun 2018 sisa anggaran turun dari tahun sebelumnya menjadi 11,13% dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,59% dengan kategori baik. Sedangkan pertumbuhan belanja mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 berada pada angka 461,14% kemudian pada tahun berikutnya di 2019 mengalami penurunan drastis yang berada pada angka 19,52% dengan kategori negatif (turun).

Untuk belanja operasi terhadap total belanja juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 persentasenya berada pada angka 65,72% kemudian mengalami penurunan ditahun 2018 yaitu 11,71% dan pada tahun 2019 berada pada angka 10,88% dengan kategori tidak setara. Sedangkan belanja modal terhadap total belanja mengalami peningkatan setiap tahunnya, di tahun 2017 sebesar 34,28% meningkat pada tahun 2018 menjadi 88,29% dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang berada pada angka 89,12% dengan kategori tidak setara. Dan hal ini sejalan dengan efisiensi belanja yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 berada pada angka 82,84%, tahun 2019 berada pada angka 88,67% dan tahun 2019 berada pada angka 94,40% sehingga masuk dalam kategori efisien.

Pembahasan

Berdasarkan deskripsi objek penelitian dan analisis data, maka adapun pembahasan di dalam penelitian ini dengan menggunakan 4 metode analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja

Hasil penelitian varians belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tergolong kategori baik, dimana realisasi belanja lebih kecil dari target anggaran belanja.

Pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp3.786.135.000 dan 2 tahun berikutnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2018 sebesar Rp19.804.033.000 dan tahun 2019 sebesar Rp22.281.801.000 sementara realisasi belanja juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp3.136.479.165, tahun 2018 sebesar Rp17.599.986.146 dan tahun 2019 menjadi Rp21.034.979.680 dengan tingkat persentase mengalami penurunan dari -17,16% menjadi -11,13% dan terakhir menjadi -5,59% dengan demikian kriteria varians belanja dengan pengukuran kinerja keuangan masuk dalam kategori baik karena penggunaan anggaran sejalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya yang menunjukkan adanya efektivitas belanja yang penggunaannya dinilai tepat atau sangat baik.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui seberapa banyak pertumbuhan setiap penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja KPU Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 461,14% menjadi 19,52% dengan penurunan sebesar 441,62% dengan nilai negatif.

Berdasarkan kriteria penilaian pertumbuhan belanja pada penelitian ini mengalami penurunan sehingga ukurannya bernilai negatif. Hal ini disebabkan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp3.136.479.165 sedangkan tahun berikutnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp21.034.979.680.

Dan juga penyebab terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2018 adalah terjadi penurunan perealisasi anggaran belanja pada belanja gaji pegawai sebesar Rp-85.515.680 atau sebanyak -4,28%. Dan pertumbuhan belanja tahun 2019 juga terjadi penurunan perealisasi anggaran belanja pada belanja barang sebesar Rp-6.044.600 atau sebanyak -4,1%. Dengan demikian kriteria penilaian pertumbuhan belanja bernilai negatif (turun) karena perluasan perubahan tidak sesuai dengan variabel makro ekonomi yang tidak mempertimbangkan beberapa hal yang dirujuk sebelumnya dan tujuan dibalik peningkatan pengeluaran, baik faktor internal yang diatur dan dikendalikan secara umum maupun faktor luar di luar kemampuan pengawasan pemerintah daerah.

3. Analisis Keserasian Belanja

Hasil perhitungan keserasian belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja tergolong kategori tidak setara, dimana pada tahun 2017 aktivitas belanja di KPU tidak hanya terfokus pada belanja operasi namun juga pada belanja modal dan

pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 aktivitas belanja KPU hanya terfokus pada belanja modal.

1) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja mengalami penurunan dari 65,72% menjadi 10,88% dengan asumsi masuk dalam kriteria penilaian tidak setara dikarenakan total belanja lebih besar dari pada total belanja operasional.

Total belanja tahun 2017 sebesar Rp3.136.479.165 sedangkan total belanja operasi Rp2.061.285.375. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja lebih besar dari total belanja operasi. Hal ini sejalan dengan tahun berikutnya dimana pada tahun 2018 total belanja Rp17.599.986.146 sedangkan total belanja operasi 2.061.131.395 dengan tingkat rasio 11,71% kemudian pada tahun 2019 total belanja Rp21.034.979.680 sedangkan total belanja operasi Rp2.287.718.341 dengan tingkat rasio sebesar 10,88%. Hal ini disebabkan karena penggunaan habis-habisan yang didistribusikan untuk penggunaan belanja operasi dan total belanja tidak persis dengan tingkat yang ditentukan sebelumnya.

2) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan penuh atas belanja-belanja yang ada. Dari hasil penelitian selama 3 tahun terakhir total belanja lebih besar dari pada total belanja modal dimana tahun 2017 sebesar Rp3.136.479.165 sedangkan total belanja modal Rp1.075.193.790 dengan tingkat rasio 34,28%. Begitupun dengan tahun 2018 dan 2019 yang mengalami peningkatan total belanja dan total belanja modal dengan tingkat rasio 88,29% naik menjadi 89,12% sehingga masuk dalam kategori tidak setara.

Pada tahun 2018 dan 2019 tingkat kenaikan sangat signifikan dari pada tahun 2017 untuk total belanja dan total belanja modal. Hal ini dikarenakan total belanja modal lebih kecil dari pada total belanja sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja mengalami peningkatan.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja menunjukkan seberapa banyak penggunaan pemeriksaan asli dengan rencana pengeluaran. Dari hasil penelitian pada tahun 2017 rasio efisiensi belanja sebesar 82,84% dan naik pada tahun 2018 sebesar 88,67% dan tahun 2019 94,40%.

Rasio efisiensi per program KPU tahun anggaran 2017 rata-rata 87,21% sementara rasio efisiensi belanja sebesar 82,84% dengan artian masuk dalam kriteria efisien karena kurang dari 100% dari kriteria yang ditentukan.

Pada tahun 2018 rasio efisiensi belanja 88,67% sementara rata-rata rasio efisiensi per program KPU sebesar 63,02% lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dari penelitian ini tahun 2018 kriteria penilaian efisiensi belanja masuk dalam kategori efisien.

Selama 3 tahun terakhir tahun 2019 rasio efisiensi belanja sebesar 94,40% lebih besar dari 2 tahun sebelumnya sedangkan rasio efisiensi per program KPU dengan nilai rata-rata 64,86% dan fluktuatif nilainya selama 2 tahun terakhir.

Rasio efisiensi belanja dari 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan hal ini diakibatkan anggaran belanja lebih besar dari pada realisasi belanja yang

ada dimana tahun 2018 realisasi belanja sebesar Rp17.559.986.146 naik menjadi Rp21.034.979.680 dan begitu pun dengan anggaran belanja yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Analisis Varians Belanja

Kinerja keuangan belanja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja dilihat dari varians belanja selama tahun 2017-2019 secara umum dapat dikatakan baik. Artinya realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja tidak melebihi anggaran yang diberikan.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Kinerja keuangan belanja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja dilihat dari pertumbuhan belanja selama tahun 2017-2019 secara umum menunjukkan penurunan (negatif).

3. Analisis Keserasian Belanja

Kinerja keuangan belanja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja dilihat dari keserasian belanja secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja modal dan hanya beberapa persen yang dialokasikan untuk belanja operasi. Berdasarkan kinerja belanja KPU Kabupaten Tana Toraja dapat dinilai tidak setara dalam keserasian belanja.

4. Rasio efisiensi Belanja

Kinerja keuangan belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari efisiensi belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja bahwa realisasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Artinya KPU Kabupaten Tana Toraja telah efisien dalam melakukan efisiensi belanja dari tahun 2017-2019 karena tidak terdapat persentase yang melebihi 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, Emron, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Halim, Abdul, 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, 2016. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah Jakarta: Salemba Empat*

- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi ke-3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad, 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Prastowo D, Dwi. 2015. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Edisi Ketiga. Yoyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rahayu, Sri dan Rachman, Andry Arifian, 2013. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rasdianto, Erliana, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan : Brama Ardian
- Ratmono, Dwi, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN
- Sasongko dan Parulian, 2015. *Anggaran*. Jakarta : Salemba Empat
- Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010*
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal60 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, 2013*. Jakarta : Direktur Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010*.Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Keuangan Negara*